

Rapat Koordinasi Penyusunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kab Barsel



Dalam rangka penyusunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah yang terdiri dari Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Anggaran SPBE Daerah serta Peta jalan Aplikasi SPBE yang terpilah layanan administrasi. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barsel melalui bidang Kominfo menyelenggarakan Rapat tentang Rencana Induk SPBE, bertempat di Aula Setda– Kab. Barsel, Kamis (1/10/2020).

Kegiatan tersebut diikuti dan dibuka oleh Bapak Sekda Kab. Barsel, serta dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas yang terkait dalam penyusunan SPBE. Pemaparan materi yang berkonsep diskusi tersebut, dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo beserta Kepala Bidang Kominfo kab. Barsel.

Adapun materi yang disampaikan yaitu Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dipaparkan oleh Kadis Kominfo, bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan SPBE mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE.

Sedangkan visi dan misi SPBE yaitu terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, misi SPBE antara lain melakukan penguatan tata kelola SPBE, mengembangkan pelayanan publik yang terpadu, membangun pondasi TIK, membangun SDM yang kompeten dan inovatif.

Dijelaskan bahwa SPBE berpedoman pada regulasi Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dulu bernama e-government yang berpedoman pada Inpres nomor 3 tahun 2003.

Pada kesempatan tersebut, Kadis Kominfo menyampaikan, keterkaitan antara sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan reformasi birokrasi yang memiliki delapan pilar yaitu (1) pengawasan, (2) akuntabilitas, (3) SDM aparatur, (4) kelembagaan, (5) tata laksana, (6) pelayanan publik, (7) manajemen perubahan, (8) peraturan, bertujuan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.